

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara – negara yang tergabung sebagai anggota PBB pada 25 September 2015 menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang didalamnya berisi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau yang lebih kita kenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Sustainable Development Goals (SDGs)* disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti.

Isi dari Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut di antaranya membahas mengenai pemberantasan kemiskinan & kelaparan, penyediaan pendidikan berkualitas, penyediaan air bersih dan sanitasi, hingga membahas mengenai pelestarian lingkungan. Dalam salah satu poin kesepakatan ini pula membahas mengenai *Gender Equity*, dengan tujuan mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan pada perempuan serta memastikan perempuan mendapat kesempatan yang setara dalam berbagai aspek. Di dalamnya membahas mengenai mengakhiri diskriminasi, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, penghapusan kebiasaan masyarakat yang merugikan perempuan seperti pernikahan dini, dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala hal.

Dalam hal kesetaraan gender pemerintah memiliki peran pada barisan terdepan dalam mengidentifikasi dan melakukan penanganan kekerasan terhadap perilaku yang membahayakan perempuan. Dengan menciptakan perencanaan dan

kebijakan guna mengatasi permasalahan mengenai ketidakadilan terhadap perempuan, dengan cara meningkatkan peran perempuan dalam lingkup negara (pemerintahan) dan bidang lainnya.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional melalui Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian / Lembaga (K/L). Maka sesuai dengan Inpres tersebut, K/L memiliki kewajiban untuk menjalankan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan perempuan, laki-laki dan anak dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi semua kebijakan, program, dan kegiatan di semua bidang masyarakat. Kehidupan dan Pembangunan di Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat rencana pembangunan di daerah, sehingga menciptakan kesejahteraan di daerah. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 yang membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, di dalamnya membahas mengenai Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang merupakan salah satu landasan dalam pelaksanaan operasional pembangunan (RPJMN 2020 – 2024). Kebijakan *gender mainstreaming* sebagai strategi pembangunan didifusikan secara tradisional sejak tahun 1975. Secara resmi pemerintah mengadopsi kebijakan ini melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015 Indonesia berada di peringkat 113 dari 182 negara, IPM menjadi indikator ketahanan hidup, pencapaian tingkat pendidikan, dan penghasilan. Meskipun posisi ini turun dari 108 pada tahun 2010. Namun, hal ini memberikan bukti bahwa Indonesia merupakan

negara yang mengalami peningkatan/perbaikan yang cukup pesat bersama beberapa negara lain seperti Korea dan China, IPM tidak mengukur kemajuan pembangunan kesetaraan gender sebagai salah satu indikatornya. Dalam pengukuran kesetaraan gender sendiri terdapat Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dibuat untuk menunjukkan angka ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan hidup. Tahun 2015 angka IPG Indonesia sebesar 0,972; semakin tinggi angka IPG maka semakin tinggi pula kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu negara.

Dalam RPJMD Kota Bekasi yang berlandaskan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan misi ke tiga yakni “Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya” memiliki indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak dan perempuan indikator berupa; jumlah PKK aktif sebanyak 100%, dan posyandu aktif pada tahun 2016 sebanyak 95%, tahun 2017 sebanyak 95%, dan tahun 2018 sebanyak 100%.
- b. Dalam program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dilihat melalui indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2016 sebanyak 23%, tahun 2017 sebanyak 26%, dan tahun 2018 sebanyak 30%.

Sedangkan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam

menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2016 sebesar 5,1 Miliar, tahun 2017 sebesar 5,3 Miliar, dan tahun 2018 sebesar 5,5 Miliar.

Dari uraian singkat tentang pemberdayaan perempuan ini, penulis tertarik untuk melihat secara lebih mendalam program-program yang direncanakan dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi di bidang pemberdayaan perempuan, dan diberi judul “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian tersebut, penulis merumuskan masalah untuk membatasi dalam penelitian dan mendapat pemahaman yang jelas tentang masalah yang akan dibahas. Rumusan masalah tersebut, di antaranya :

1. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi tahun 2020?
2. Bagaimana capaian yang diperoleh oleh Kota Bekasi dalam menjalankan Program Pemberdayaan Perempuan?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat pelaksanaan Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi tahun 2020?
4. Hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan perbaikan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah didapat, maka tujuan dari penulisan penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi tahun 2020 apakah sudah sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi tahun 2020.
3. Untuk mencari alternatif-alternatif kebijakan atau program yang dapat meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis atau akademis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dan manfaat penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang terkait dan dalam pemikiran untuk memajukan kepentingan Kota Bekasi, terlebih dalam bidang perlindungan anak dan kesetaraan gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengetahuan guna meningkatkan perbaikan kesetaraan gender dan perlindungan anak, manfaat antara lain:

- a. Memberikan saran kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk dapat melakukan pengembangan program guna mencapai peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender dengan menciptakan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan.
- b. Untuk menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai bahan pertimbangan lembaga dapat mempertimbangkan untuk menciptakan program yang mengedepankan kesetaraan gender.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui program pengarusutamaan gender.

1.5 Penelitian Terdahulu

Kerangka pemikiran teoritis berisi pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang memiliki keterkaitan atau kesamaan dengan permasalahan atau isu yang diangkat dan tujuan penelitian secara sistematis dan analitis kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut oleh peneliti. Dari berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai Pemberdayaan Perempuan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang relevan bertujuan untuk menjadi pembandingan antara penelitian yang sebelumnya telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan serta memberikan pembaharuan maupun penguatan. Penulis menjadikan beberapa penelitian berikut sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian penulis.

Pola Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Kampung Organik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan (Studi Kasus Paguyuban Perempuan

Pengelola Sampah Terpadu Legok Makmur di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang) oleh Dyah Ayu Risky Paramitha (2019). Penelitian ini berfokus pada keikutsertaan perempuan dalam upaya pengelolaan sampah yang tergabung dalam Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu Legok Makmur (PPPST Legok Makmur) yang merupakan pelopor dari Kampung Organik. Terbentuknya PPPST Legok Makmur bermula dari tumpukan sampah di TPS yang menjadikan lingkungan sekitarnya kotor. Kampung Organik Legok Makmur berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan Kecamatan Magelang Utara. Program yang dilaksanakan oleh PPPST Legok Makmur membantu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat sekitar khususnya perempuan, meningkatkan partisipasi, dan menjadikan perempuan lebih mandiri dan mampu berkreasi dalam pengelolaan sampah.

Strategi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rembang Tahun 2016 oleh Alfado Haryadi Saputra (2017). Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan bagaimana upaya pemerintah daerah mempertahankan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Kabupaten Rembang. Selama tahun 2007-2016, Kabupaten Rembang telah beberapa kali meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam berbagai kategori. Kabupaten Rembang dianugerahi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk beberapa strategi, yaitu: pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, peningkatan status perempuan dalam politik dan jabatan publik, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kemampuan hidup di sektor teknologi, peningkatan sektor pendidikan dan kelembagaan penguatan kualitas hidup.

Kabupaten Rembang juga dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), hal ini karena adanya ikut serta dari setiap elemen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Namun pemerintah Kabupaten Rembang tetap memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaan program serta mempertahankan predikatnya sebagai Kabupaten Layak Anak, salah satunya berasal dari eksternal dimana budaya yang masih melekat di masyarakat yaitu pernikahan anak perempuan dibawah umur.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian-penelitian sejenis sebelumnya terdapat pada lokasi penelitian dimana sampai sekarang belum ada peneliti yang melakukan penelitian dengan bahasan mengenai pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Kota Bekasi yang diangkat sebagai tema skripsi di Ilmu Pemerintahan Undip, perbedaan lainnya terletak pada fokus waktu penelitian disini peneliti mengambil waktu penelitian pada tahun 2020.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Manajemen Pembangunan

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah ilmu pengetahuan maupun seni. Ada suatu pertumbuhan yang teratur mengenai manajemen –suatu ilmu pengetahuan- yang menjelaskan manajemen dengan pengacuan kepada keberadaan-keberadaan umum.

Pembangunan merupakan salah satu konsep yang memiliki hubungan sangat dekat dengan pengelolaan pembangunan bangsa. Menurut Bryant dan White (1987), melihat pembangunan sebagai konsep normatif dan merupakan

eufemisme untuk perubahan, modernisasi, dan pertumbuhan. Di Indonesia sendiri kata pembangunan telah menjadi sebuah slogan dan kata kunci dalam segala bidang di kehidupan. Sedangkan Budiman (2000), secara umum istilah pembangunan dapat diartikan sebagai upaya untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Pembangunan secara umum diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat dalam bidang ekonomi.

Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen pembangunan nasional adalah pengelolaan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, menuju ke arah perwujudan cita-cita bangsa. Konsep manajemen pembangunan adalah satu perspektif dan cara lain untuk mengatakannya, karena melihat peran manajemen dalam mencapai pembangunan. Pada dasarnya, masalah manajemen pembangunan juga merupakan masalah manajemen pembangunan.

1.6.2 Fungsi Manajemen Pembangunan

Manajemen secara umum memiliki lima fungsi utama yang ada untuk pengoptimalan dalam melaksanakan kegiatan yang membutuhkan keahlian manajerial, yang terdiri dari:

- a. *Planning*, perencanaan berkaitan dengan perumusan tindakan yang akan dilaksanakan dan memutuskan program yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. *Planning* juga menetapkan program apa, kapan waktu pelaksanaannya, dan bagaimana caranya. Perencanaan diperlukan untuk memastikan pemanfaatan yang tepat dari

sumber daya manusia dan non-manusia.

- b. *Organizing*, merupakan proses pengorganisasian yang melibatkan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, penugasan kegiatan, dan pendeklarasian wewenang.
- c. *Staffing*, hampir sama dengan *organizing*. Namun, *Staffing* berfokus pada penempatan sumber daya manusia di tempat yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya.
- d. *Motivating*, pemberian semangat, inspirasi, maupun dorongan dengan tujuan untuk mengarahkan perilaku manusia kearah tujuan yang diinginkan.
- e. *Controlling*, melakukan pengukuran kinerja terhadap tujuan pelaksanaan, menentukan penyebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif jika perlu.

1.6.3 Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi program adalah suatu prosedur kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan program. Kegiatan untuk mengevaluasi program dirancang untuk memahami seberapa sukses program tersebut.

Menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2009: 5), evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Sedangkan menurut Tyler (1950) yang dikutip oleh

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 5), evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data/informasi ilmiah yang hasil dari proses pengumpulan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam membuat kebijakan.

Dalam buku karangan AG. Subarsono (2012 : 120 – 121), evaluasi program memiliki tujuan:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- b. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- d. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

- e. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Bila dilihat dari tujuan evaluasi pembangunan maka dapat dikatakan bahwa evaluasi pembangunan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif digunakan untuk mengetahui *output* dari suatu kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang sebelumnya, dengan tujuan akhir adalah menentukan kebijakan selanjutnya yang menjadi perbaikan.

1.6.4 Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Dalam konsep pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan diartikan sebagai suatu kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan daya (energi) manusia melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan (*competency*), kepercayaan (*confidence*), wewenang (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dalam rangka melaksanakan kegiatan- kegiatan (*aktivitas*) organisasi untuk meningkatkan kinerja (*performance*) sebagaimana diharapkan (Hasan Bisri, 2000).

Pemberdayaan berasal dari kata “*empowerment*” dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai kekuatan. Dalam arti menganugerahkan atau meningkatkan kekuasaan pada orang yang tidak mampu atau kurang beruntung. Pemberdayaan merupakan konsep untuk menanggapi kegagalan pelaksanaan.

Konsep pemberdayaan mengacu pada bagaimana setiap individu khususnya dalam hal ini adalah perempuan di lingkup daerah tertentu memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kesadaran akan perannya dalam masyarakat, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, dan memperoleh barang-barang dan jasa yang diperlukan.

Tujuan dari pemberdayaan menurut Ambar T. Sulistyani (2004: 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Menurut Sumodiningrat tujuan dari pemberdayaan perempuan yaitu:

1. Membangun eksistensi. Perempuan harus menyadari bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk mewujudkan potensinya.
2. Memotivasi perempuan untuk diberdayakan atau memberdayakan untuk membuat keputusan tentang pilihan hidup mereka melalui proses dialog. Wanita berhak menentukan pilihannya sendiri.
3. Meningkatkan kesadaran perempuan akan kesadaran dan status mereka

di depan umum dan di rumah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan akan kesetaraan gender atau status sosial yang setara dengan laki-laki, dan menjadikan perempuan lebih mandiri dan terlibat dalam pembangunan.

Pemberdayaan perempuan merupakan bentuk upaya menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Peran pemberdayaan perempuan merupakan komitmen nasional dalam peningkatan status, posisi, dan kondisi dari setiap perempuan dalam mencapai kemajuan yang setara dengan laki – laki. Dewasa ini sudah ada perempuan yang menjadi Presiden, Gubernur, Menteri, Bupati, Camat, dan lain-lain. Hal tersebut menegaskan perempuan memiliki multi peran dalam masyarakat bukan hanya berperan ganda.

Melibatkan perempuan dalam proses pembangunan bukan sekadar tindakan dari perspektif humanistik. Sejatinnya, peran perempuan dalam bidang partisipasi dalam pembangunan merupakan tindakan peningkatan harkat dan martabat perempuan itu sendiri.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Manajemen Pembangunan

Yang dimaksudkan dengan manajemen pembangunan nasional adalah pengelolaan serangkaian upaya pembangunan yang dilaksanakan berkelanjutan. Konsep mengenai manajemen pembangunan merupakan sistem yang dimulai dari perencanaan, pengerahan sumber daya, pelibatan

masyarakat, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan.

1.7.2 Evaluasi Pelaksanaan Program

Setiap program yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan atau bahkan untuk merubah suatu hal. Keberhasilan suatu program lebih sering dinilai melalui angka dapat berupa angka peningkatan ataupun angka penurunan, dalam hal pemberdayaan perempuan kedua jenis penilaian ini menjadi indikator utama.

Evaluasi program merupakan prosedur kegiatan aktif yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu program. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa sukses suatu program dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi dan kebijakan baru lainnya.

Dapat dikatakan evaluasi program merupakan proses pengumpulan data/informasi ilmiah, dan hasil yang dihasilkan selama proses pengumpulan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat kualitatif, hal ini dipilih karena membahas mengenai strategi pemerintah Kota Bekasi dalam meraih keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dengan meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Penelitian kualitatif bersifat sistematis, hal ini

untuk dapat melakukan pengkajian terhadap objek tanpa adanya manipulasi dan tanpa adanya pengajuan hipotesis.

Penelitian kualitatif menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan sumber data di antaranya adalah wawancara, catatan, pengamatan pribadi, dan studi literasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada saat penelitian dengan mengkaji fenomena-fenomena yang muncul dari suatu keadaan. Studi deskriptif juga dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi kualitatif agar dapat memberikan deskripsi yang lengkap dan akurat.

1.8.2 Situs Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dibutuhkan agar data yang didapatkan merupakan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber dalam pengumpulan data-data yang memiliki hubungan atau relevan serta bersifat akurat dan sesuai dengan kondisi dilapangan. Penelitian ditentukan dengan pengambilan sampel yang bertujuan seperti yang dijelaskan oleh Abdurahman (2012: 20) bahwa informan dipilih berdasarkan kelompok yang dianggap mengetahui mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan memiliki kaitan dengan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana sebuah data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu:

Sumber data dalam penelitian merupakan dimana tempat peneliti memperoleh data, mengambil data, dan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. **Data Primer**

Data mentah adalah data yang diperoleh dan/atau dikumpulkan langsung dari sumber primer (informasi tangan pertama), meliputi observasi lapangan, wawancara, dan dokumen. Keuntungan dari data mentah adalah sesuai dengan tujuan penelitian dan dikumpulkan dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer berasal dari data wawancara, observasi, dan dokumen yang diberikan oleh informan yakni: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

2. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data sekunder dikumpulkan dengan tujuan penyelesaian masalah yang didapatkan melalui berbagai sumber seperti literatur, maupun internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah paling utama dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan kegiatan tanya jawab dan diajukan secara lisan oleh peneliti terhadap responden. Wawancara memiliki tujuan untuk bertukar informasi dan pandangan sehingga dapat dikonstruksikan makna bersama atas suatu topik. Wawancara dilakukan pada topik yang terkait dengan faktor yang mendorong pengarusutamaan gender, program dan strategi yang diterapkan untuk penghargaan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan dilakukan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. (Martono, 2011:97).

Penelitian ini juga melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Penelitian kepustakaan dalam pengumpulan data merupakan sumber data tambahan untuk membantu proses penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta dan memahami konsep yang digunakan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data melalui data tertulis terutama arsip-arsip dan termasuk buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Nawawi, 2005: 133). Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan-kegiatan pada tahun yang berkaitan yakni pada tahun 2016 – 2018.

1.9 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis kualitatif deskriptif adalah cara analisis data yang diperoleh, dikumpulkan, dan dikelompokan atau ditafsirkan berdasarkan sifat data yang kemudian dilakukan interpretasi data berdasarkan pada fakta yang didukung oleh pemikiran kritis guna memperoleh hasil yang lebih bermanfaat. Teknik ini menjelaskan tentang latar belakang, proses, perencanaan dan rancangan strategis pelaksanaan pemberdayaan perempuan Kota Bekasi.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik dalam penelitian kualitatif untuk membandingkan dan menelaah informasi yang diperoleh berdasarkan waktu dan alat yang berbeda. Menurut Patton dalam Moleong (2010:280), teknik analisis data adalah proses mengklasifikasikan urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam unit-unit dasar pola, kategori, dan deskripsi. Barton membedakan analisis data dari interpretasi. Artinya, mementingkan analisis, menafsirkan pola deskripsi, dan menemukan hubungan antar dimensi deskripsi. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam

Moleong (2010:280), analisis data adalah suatu proses penetapan suatu upaya formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis untuk memudahkan pengembangan data dan upaya menginformasikan hipotesis yang relevan. Jadi, jika dicermati menurut definisi pertama yang lebih menitikberatkan pada realisasi pengorganisasian data, sedangkan definisi kedua lebih menekankan pada maksud dan tujuan analisis data, maka dapat disimpulkan dari kedua definisi tersebut bahwa analisis data adalah proses. dari pengorganisasian. Dan mengurutkan data berdasarkan pola, kategori, dan deskripsi dasar, sehingga menghasilkan tema dan hipotesis yang dapat dirumuskan dalam cara data disajikan.

Triangulasi merupakan teknik analisis melalui pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk keperluan validasi atau untuk perbandingan dengan data tersebut (Moleong, 2010: 330). Triangulasi yang digunakan dengan sumber data melalui proses membandingkan dan mengecek suatu keabsahan informasi yang didapatkan melalui waktu dan metode yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara yakni:

- a. Melakukan perbandingan data yang diperoleh melalui hasil pengamatan dengan data yang diperoleh melalui wawancara;
- b. Melakukan perbandingan dengan apa yang dikatakan oleh orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- c. Melakukan perbandingan dengan apa yang dikatakan orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Dan melakukan perbandingan mengenai hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.